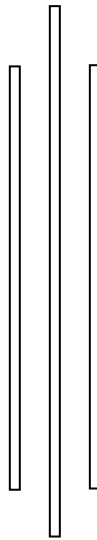




**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LKPj)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang disampaikan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan kepada Bupati yang memuat hasil penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Camat selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 menjadi dokumen laporan hasil kerja Camat mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan kewilayahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan urusan kewilayahan kecamatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Pasar Beriang, 31 Desember 2023  
Camat Ranah Ampek Hulu Tapan,



AGNES DIHENO ARNAS, S.STP, M.M  
Pembina/IV.a  
NIP. 19920415 201206 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
<b>BAB II HASIL PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN</b>	
2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	5
2.2 Kebijakan Strategis.....	6
2.3 Penghargaan .....	6
<b>BAB III PENUTUP</b>	



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2023 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan bermaksud agar terwujudnya Akuntabilitas Camat dalam melaksanakan Tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan yaitu urusan kewilayahan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

#### **1.3.2 Tujuan**

Dalam penyusunan LKPj ini bertujuan sebagai berikut:

1. Adanya keluaran berupa dokumen LKPj Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governce* pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan



**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN TUGAS CAMAT**  
**RANAH AMPEK HULU TAPAN**

**2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah orang yang memilih puas atas pelayanan dalam kotak saran-Jumlah orang yang memilih tidak puas atas pelayanan dalam kotak saran) dibagi dengan total partisipasi orang dalam kotak saran	Persen	90	90	Tingkat kepuasan masyarakat meningkat terhadap pelayanan menggambarkan tingkat pelayanann kepada masyarakat

		dikali seratus = persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.				semakin membaik
2.	Peningkatan Nilai LAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90-100 = AA/ Sangat Memuaskan</li> <li>2. 80-90= A/ Memuaskan</li> <li>3. 70-80= BB/ Sangat Baik</li> <li>4. 60-70= B/ Baik</li> <li>5. 50-60= CC/ Cukup</li> <li>6. 30-50=C/ Kurang</li> <li>7. 0-30= D/ Sangat Kurang</li> </ol>	Kategori	80-90= A/ Memuaskan	80-90= A/ Memuaskan	Capaian Realisasi Nilai LAKIP Sudah mencapai Target menggambarkan Kinerja telah sesuai harapan

## 2.2 Kebijakan Strategis





4

Kebijakan Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan	Keputusan Camat tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2023	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

## 2.3 Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan:

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Badan Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
1	2	3	4	5	6
1	Peringkat I Kategori Kecamatan Dalam Penilaian Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 13 Desember 2023	
2.	Peringkat II Kategori Kecamatan dengan Kualifikasi MENUJU INFORMATIF Dalam Pemingkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari Tingkat Kab. Pesisir Selatan 2023	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 22 Desember 2023	 
3.	Peringkat III Kategori Kecamatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Bupati Pesisir Selatan	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Painan, 16 Maret 2023	

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2023 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal dan merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Lain sisi masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tahun Anggaran 2023 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen kecamatan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan harapan semoga kinerja tugas yang

dilimpahkan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.

Pasar Beriang, 31 Desember 2023  
CAMAT,



AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M  
Pembina/IV.a  
NIP. 19920415 201206 1 001



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN  
URUSAN KEWILAYAHAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

No	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	RINCIAN	Realisasi Keuangan		
			Jumlah Dana	Jml. Realisasi Keu (Rp.)	% Keu
1	2		3	4	5
	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN		1,286,833,092	1,257,940,157	97.75
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		1,286,833,092	1,257,940,157	97.75
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	981,379,448	953,655,532	97.18
	1).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	953,833,092	926,109,188	97.09
		Belanja Barang dan Jasa	953,833,092	926,109,188	97.09
	2).	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27,546,356	27,546,344	100.00
		Belanja Barang dan Jasa	27,546,356	27,546,344	100.00
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148,821,471	148,310,350	99.66
	1).	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2,608,500	2,602,500	99.77
		Belanja Barang dan Jasa	2,608,500	2,602,500	99.77
	2).	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,000,851	6,975,000	99.63
		Belanja Barang dan Jasa	7,000,851	6,975,000	99.63
	3).	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,214,288	11,179,500	99.69
		Belanja Barang dan Jasa	11,214,288	11,179,500	99.69
	4).	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,793,500	4,790,000	99.93
		Belanja Barang dan Jasa	4,793,500	4,790,000	99.93
	5).	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500,040	100,000	20.00
		Belanja Barang dan Jasa	500,040	100,000	20.00
	6).	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,085,000	8,074,000	99.86
		Belanja Barang dan Jasa	8,085,000	8,074,000	99.86
	7).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,619,292	114,589,350	99.97
	b.	Belanja Barang dan Jasa	114,619,292	114,589,350	99.97
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,225,000	13,200,000	99.81
	1).	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	13,225,000	13,200,000	99.81
		Belanja Barang dan Jasa	13,225,000	13,200,000	99.81
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,689,200	74,689,200	100.00
	1).	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,689,200	11,689,200	100.00
		Belanja Barang dan Jasa	11,689,200	11,689,200	100.00
	2).	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,000,000	63,000,000	100.00
		Belanja Barang dan Jasa	63,000,000	63,000,000	100.00
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,717,973	68,085,075	99.08
	1).	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,654,473	60,545,075	99.82
		Belanja Barang dan Jasa	60,654,473	60,545,075	99.82
	2).	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,350,000	2,350,000	100.00
		Belanja Barang dan Jasa	2,350,000	2,350,000	100.00
	3).	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	5,713,500	5,190,000	90.84
		Belanja Barang dan Jasa	5,713,500	5,190,000	90.84

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini dengan pagu anggaran Rp 1.286.833.092 dengan realisasi anggaran Rp 1.257.940.157 (97,75%). Hasil/ keluaran adalah penunjang operasional Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran untuk kecamatan yang terbatas khususnya untuk anggaran Penunjang Kegiatan PATEN.
2. Masih kurangnya tenaga PNS di Kantor Camat

Upaya dalam mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas telah dilaksanakan oleh kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menangani keterbatasan dana yang ada dalam pagu anggaran kantor Camat telah berusaha menggunakan anggaran semaksimal mungkin.
2. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di Kantor Camat telah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Pagar Beriang, 31 December 2023





2.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.2  
 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kewilayahan	CAMAT Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda Kab. Pessel No 7 Tahun 2021 tentang APBD Kab. Pessel T.A 2022; Perbup Kab. Pessel No. 157 Tanggal 30 Desember 2021 tentang penjabaran APBD Kab. Pessel T.A 2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Layanan Administrasi perkantoran, Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	Bulan	12 bulan	12 bulan	1,286,833,092	tidak ada permasalahan	-	-

Pasar Beriang, 31 Desember 2023  
 CAMAT  
  
 ARNAS, S.STP, M.M.  
 20415 201206 1 001